



Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial

Salma Bialfi Karimah¹

Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

Email: salma.bialfi.karimah24195@mhs.uingusdur.ac.id

Nur Khasanah²

Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

Email: nur.khasanah@uingusdur.ac.id

Correspondent: salma.bialfi.karimah24195@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

History Artikel:

Received 26 November 2025

Revised 30 November 2025

Accepted 1 Desember 2025

Available online 6 Desember 2025

Islamic education plays an important role in building the social structure of society through the internalization of values, character development, and the strengthening of religious culture. This study aims to examine the relationship between Islamic education and social change in Indonesia, particularly through the contributions of educational institutions such as pesantren and madrasah. The method used in this study is qualitative, with a literature study approach. The results of this study indicate that Islamic education serves as an important agent of social change in strengthening the social, economic, and cultural resilience of society. Pesantren and madrasah are not only places for imparting religious knowledge, but also centers for developing community capacity to adapt to changing times. Islamic values, such as discipline, responsibility, cooperation, and principles of Islamic economics, serve as the foundation for strengthening solidarity.

Kata kunci:

Islamic education, social change

Pendahuluan/ مقدمة

Pendidikan adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat menjadi pribadi yang terampil, berpengetahuan, dan memiliki perspektif yang luas. Pendidikan juga memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa dapat lebih mudah terwujud.

Terdapat keterikatan yang kuat antara pendidikan dan perubahan sosial. Keduanya saling memengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, sementara perubahan sosial merupakan konsekuensi dari pertumbuhan cara berpikir, pengetahuan, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam banyak situasi, perubahan sosial dapat diatur melalui kebijakan pendidikan, meskipun juga bisa muncul secara alami akibat pengaruh budaya, teknologi, atau interaksi dengan dunia luar.

Pendidikan berperan sebagai penggerak perubahan sosial karena dapat menciptakan masyarakat yang berpikir kritis, terbuka terhadap inovasi, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan pendidikan, individu tidak hanya dapat memperbaiki diri, tetapi juga

berkontribusi sebagai agen perubahan yang bisa mempengaruhi struktur sosial di sekelilingnya. Oleh sebab itu, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan generasi yang inovatif, solutif, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika perubahan sosial di masyarakat.

Metode/ منهجية البحث

Dalam pengumpulan data, ada berbagai metode yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti analisis visual, dan tinjauan pustaka. Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka dalam penelitian kualitatif. Proses perubahan kualitatif yang melibatkan fungsi fisik dan mental berlangsung terus-menerus menuju perbaikan sampai akhir hidup sebagai dampak dari interaksi dengan lingkungan

Hasil dan Diskusi

A. Pertumbuhan Institusi Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan, diharapkan dapat muncul generasi penerus yang memiliki karakter yang kuat untuk menerima tanggung jawab kepemimpinan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan pendidikan di semua bidang. Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, diperlukan media atau wadah yang disebut institusi.

Institusi pendidikan merupakan organisasi, media, wadah, atau situasi tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran, baik secara terstruktur maupun dalam bentuk tradisi yang telah ada sebelumnya (Roqib, 2009: 121). Perkembangan institusi pendidikan terus berubah untuk mencapai bentuk yang ideal, terutama melalui sejarah panjang, khususnya perkembangan institusi pendidikan Islam di Indonesia. Dalam sejumlah sumber terkait pendidikan, jarang ditemukan pandangan para pakar mengenai definisi institusi pendidikan Islam. Abuddin Nata menjelaskan bahwa kajian mengenai institusi pendidikan Islam (tarbiyah Islamiyah) umumnya berhubungan secara implisit dengan diskusi tentang berbagai jenis institusi pendidikan. Namun, dapat dipahami bahwa institusi pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang memiliki karakteristik ke-Islaman yang mendukung pelaksanaan pendidikan Islam dengan baik (Nata, 2005).

Pendidikan Islam pada awalnya dianggap sekadar materi yang lambat laun mengalami perubahan dan juga dipandang sebagai sebuah institusi. Hal ini terlihat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan demikian, istilah “pendidikan Islam” mencakup empat pemahaman, yaitu pertama: pendidikan Islam sebagai materi; kedua, pendidikan Islam sebagai institusi; ketiga, pendidikan Islam sebagai kultur; dan keempat, pendidikan Islam sebagai pendidikan yang islami (Soebahar, 2013).

Dalam konteks pendidikan Islam sebagai institusi, yang dimaksudkan adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan Madrasah sebagai sekolah umum yang memiliki ciri khas Islam (Soebahar, 2013). Pesantren sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam sudah tidak diragukan lagi. Hal ini terlihat dari peran strategis pesantren, antara lain:

1. Pesantren masih dianggap sebagai pusat bagi umat Islam di Indonesia. Ini tidak terlepas dari keyakinan masyarakat bahwa menuntut ilmu agama akan lebih efektif jika belajar di pesantren
2. Pendidikan di pesantren yang telah melengkapi program pendidikannya mampu menyediakan pendidikan yang integratif (gabungan) dan komprehensif (menyeluruh), yang terlihat dari kombinasi ilmu dengan moralitas santri
3. Tidak ada batasan usia untuk peserta didik, menawarkan pendidikan seumur hidup dengan waktu 24 jam

4. Mengedepankan nilai kejujuran, keikhlasan, dan akhlak baik selama proses pembelajaran;
5. Persaudaraan sebagai elemen fundamental santri, terlihat dari kebersamaan santri di pesantren yang tinggal dalam satu kamar berisi banyak orang dan berbagi makanan sederhana.

Jika kita telusuri sejarah pendidikan di Jawa, sebelum kedatangan agama Islam sudah ada lembaga pendidikan kuno Jawa yang praktik pendidikannya serupa dengan pesantren. Lembaga pendidikan kuno tersebut disebut pawiyatan, di mana terdapat Ki Ajar yang mengajar dan cantrik yang belajar. Kedua kelompok ini tinggal dalam satu kompleks, dan di sana berlangsung proses belajar mengajar. Dengan membandingkan pendidikan pawiyatan ini dengan pesantren, sebenarnya tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa pesantren telah ada sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Sebab, model pendidikan pesantren sebenarnya sudah eksis sebelum kedatangan Islam, yaitu pawiyatan (Daulay, 2009: 21-22).

Dengan kehadiran Islam, diperlukan sarana untuk pendidikan, sehingga model pawiyatan dijadikan acuan dan sistem yang ada diubah menjadi sistem pendidikan Islam. Esensi dari pesantren adalah pengajaran ilmu agama dan perilaku beragama. Oleh karena itu, mata pelajaran yang diberikan hanya seputar agama. Setelah siswa mencapai tingkat kecerdasan tertentu, barulah mereka diajarkan kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik ini juga dibagi menjadi tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Mahmud Yunus membagi pesantren dalam tahap awal menjadi empat tingkatan, yaitu: tingkat dasar, menengah, tinggi, dan takhassus. Metode pendidikan pesantren, beserta sarana dan fasilitas lainnya, masih bersifat tradisional. Administrasi pendidikan di pesantren tidak seperti sekolah umum yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda, dan bersifat non-klasikal, dengan metode seperti sorogan dan wetonan hafalan. Menurut Zamaksyari Dhofier, terdapat lima elemen utama pesantren: kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik (Daulay, 2009: 22).

Pada awal perkembangannya, pesantren memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai institusi pendidikan; kedua, sebagai tempat untuk menyebarkan agama. Meskipun banyak perubahan telah terjadi, fungsi utama tersebut masih melekat pada pesantren. Hingga kini, fungsi aslinya tetap dijaga oleh pesantren meskipun ada pengaruh modernisasi. Hal ini mungkin terjadi karena pesantren memiliki "wilayah sosial" yang dapat menahan pengaruh negatif dari modernisasi. Di masa kolonial, pondok pesantren berperan aktif dalam melawan pengaruh kolonialisme dengan cara menutup diri dari pengaruh luar. Peran ini terus dilanjutkan, bahkan beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Karena sifatnya yang tertutup pada masa lalu, pesantren sebagai lembaga pendidikan kurang dikenal secara luas. Namun, saat membahas model pendidikan terbaik bagi bangsa Indonesia, para pemimpin negeri ini, antara Oktober 1935 hingga April 1936, pernah bertukar ide lewat majalah Pujangga Baru, Suara Umum, Warta Deli, dan Wasita, yang kemudian dihimpun oleh Akhdiyat K. Mihardja dalam buku Polemik Kebudayaan 1948 (Ali dan Ali, 1995: 146).

Yang menarik dalam Polemik Kebudayaan tersebut ialah pandangan yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara dan Dr. Sutomo, yang merupakan pemimpin golongan nasionalis, bukan pemimpin Islam, yang mengusulkan agar pesantren dijadikan sebagai model pendidikan nasional. Menurut mereka, pendidikan di pesantren lebih cocok untuk bangsa Indonesia. Pesantren adalah bagian dari warisan budaya Indonesia, sehingga sebaiknya pendidikan pesantren dijadikan acuan dalam menyusun sistem pendidikan nasional (Ali dan Ali, 1995: 146). Seiring perkembangan selanjutnya, pesantren mengalami perubahan yang membuatnya bertransisi dari tradisional menjadi modern. Mengikuti kemajuan zaman, terutama setelah Indonesia merdeka, berbagai perubahan mulai terjadi dalam dunia pesantren. Banyak pesantren yang telah beradaptasi dengan perkembangan zaman, meskipun di beberapa tempat masih ada pesantren yang mempertahankan sifat konservatifnya (Daulay, 2009: 22).

Sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah arus modernisasi, untuk mempertahankan eksistensinya, sebaiknya mengacu pada pendapat Nurcholish Madjid, yang menyatakan bahwa pesantren harus memenuhi tuntutan hidup santrinya di masa depan sejalan dengan perkembangan zaman, dengan membekali mereka dengan kemampuan nyata melalui pendidikan atau pengajaran ilmu umum yang memadai. Di bagian ini, seperti yang terjadi saat ini, juga harus ada kemungkinan untuk menyediakan pilihan-pilihan.

Jurusan untuk para siswa ditentukan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, sasaran pendidikan di pesantren adalah menciptakan individu yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap petunjuk ajaran Islam (Daulay, 2009: 75).

1. Lembaga Pendidikan Pesantren

Manfred Ziemek menjelaskan bahwa asal kata dari pesantren adalah pesantrian yang berarti "tempat bagi santri". Santri atau siswa (biasanya sangat beragam) belajar dari pimpinan pesantren (kiai) serta para pengajar (ulama atau ustadz). Materi yang diajarkan meliputi berbagai aspek pengetahuan tentang Islam. Elemen-elemen utama pesantren terdiri dari : pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kiai. Ada juga yang menyatakan bahwa elemen-esensial pesantren itu hanya tiga, yaitu: 1. Kiai yang mengajar dan memberi pendidikan, 2. Santri yang sedang belajar, 3. Masjid sebagai tempat belajar (Daulay, 2009: 61-62). Beberapa alasan utama mengenai pentingnya pondok dalam pesantren adalah: pertama, banyaknya santri yang datang dari tempat yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kiai yang sudah terkenal keahliannya. Kedua, pesantren-pesantren sering berada di daerah pedesaan di mana tidak ada tempat tinggal untuk menampung santri dari luar daerah. Ketiga, terdapat hubungan timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiai seperti orang tua mereka sendiri.

Berdasarkan penelitian Ronald Alan Lukens Bull (1977), seorang doktor yang fokus pada studi pondok pesantren dari Amerika Serikat, disebutkan bahwa lembaga pendidikan Islam ini pertama kali didirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M. Dalam upaya menyebarkan agama Islam di Jawa, tokoh yang berhasil mendirikan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Pondok pesantren pertama kali dibangun di Kembanguning yang hanya memiliki tiga santri. Kemudian, Raden Rahmat pindah ke Ampel Denta dan mendirikan pondok pesantren yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Selanjutnya, muncul pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh para santri dan anak-anaknya, seperti Pondok Pesantren Giri oleh Sunan Giri, Pondok Pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan Pondok Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang (Wahjotomo, 1997:70). Pada awalnya, fungsi pondok pesantren adalah sebagai media untuk islamisasi yang menggabungkan tiga aspek: ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan Islam, serta ilmu dan amal untuk menjalani aktivitas sehari-hari dalam masyarakat (Soebahar, 2013: 34).

Bangunan pondok pesantren mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya jumlah santri. Pada akhirnya, dengan dukungan masyarakat sekitar yang peduli, pemukiman tersebut berkembang menjadi "kampus atau kompleks", tempat bagi santri untuk beribadah, menuntut ilmu, dan berinteraksi dengan kiai sebagai sosok utama yang menjadi teladan bagi santri dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa tempat tersebut kemudian dikenal dengan istilah pondok pesantren. Pondok berarti tempat tinggal, sedangkan pesantren merujuk pada penantrian, yang memiliki dua pengertian, yaitu sebagai tempat bagi santri atau proses menjadi santri (Soebahar, 2013: 35).

Pesantren telah melalui sejarah panjang, yang dulunya hanya berfungsi dalam menyebarkan ilmu, kini telah berkembang menjadi lembaga yang menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, membentuk karakter, serta menerima kurikulum pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selanjutnya, muncul berbagai model pondok pesantren, termasuk pondok pesantren modern yang terbuka terhadap

perubahan, maju, dan berkembang dengan menerima kurikulum negara, serta ada pula yang berkomitmen untuk tetap mempertahankan tradisi salafi dan konservatif dalam menghadapi dinamika kebutuhan pendidikan, yang dikenal sebagai pesantren Salaf.

2. Institusi Pendidikan Madrasah

Madrasah adalah jenis lembaga pendidikan Islam yang memiliki struktur formal. Dalam proses pembelajarannya, sistemnya diatur dengan baik. Madrasah berfungsi sebagai tempat yang menunjang kegiatan belajar serta mengajar secara terintegrasi dan terorganisir. Proses pendidikan di dalamnya diatur sedemikian rupa, melibatkan guru dan siswa, serta jadwal pelajaran yang merujuk pada kurikulum, silabus, dan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Terdapat waktu belajar yang ditentukan dan didukung oleh sarana serta fasilitas pendidikan yang memadai, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Sebagai institusi pendidikan formal, madrasah berperan penting dalam membentuk karakter siswa yang islami. Madrasah dapat dianggap sebagai lembaga pendidikan kedua yang berkontribusi dalam proses pembelajaran peserta didik. Hal ini menjadi relevan, karena madrasah merupakan tempat yang khusus untuk memperoleh pengetahuan.

Dari segi sejarah, madrasah muncul sebagai perkembangan dari masjid. Pada masa awal, pendidikan di masjid melibatkan pendidik, siswa, materi, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi serta karakteristik peserta. Namun, dalam menyampaikan materi terkadang diperlukan sesi diskusi, pertukaran ide, hingga perdebatan. Metode ini kadang kurang cocok dengan suasana tenang dan khidmat yang diperlukan oleh sebagian pengunjung masjid. Madrasah sebagai lembaga pendidikan agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pada masa penjajahan Belanda, madrasah dibangun untuk seluruh masyarakat. Pada tahun 1908, Syekh Abdullah Ahmad menjadi penggerak pendirian madrasah pertama, diikuti dengan pendirian Madrasah Schoel di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar pada tahun 1910, dan pada tahun 1918 M. Mahmud Yunus mendirikan Diniyah Schoel sebagai kelanjutan dari Madrasah Schoel. Madrasah Tawalib didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang pada tahun 1907. Kemudian, Madrasah Nurul Uman didirikan oleh H. Abdul Somad di Jambi. Madrasah mulai berkembang di Jawa sejak tahun 1912. Terdapat model pendidikan madrasah-pesantren NU seperti Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya yang dimulai pada tahun 1919; ada juga madrasah yang mengadopsi sistem pendidikan Belanda, seperti Muhammadiyah yang pada tahun 1912 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Muballighin, dan madrasah Diniyah. Di samping itu, terdapat model Al-Irsyad yang pada tahun 1913 mendirikan madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin, dan Tahassus; atau model madrasah PUI di Jawa Barat yang mengembangkan pendidikan pertanian. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga keluarnya SKB Tiga Menteri, madrasah dengan persentase yang cukup baik masih berpegang pada orientasi yang telah ditetapkan. Namun, perubahan dalam struktur sosial mendorong pesantren untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang digariskan oleh sistem pendidikan nasional. Berbagai mata pelajaran yang sebelumnya bukan merupakan fokus di madrasah mulai diperkenalkan.

Dahulu, madrasah hanya menerapkan sistem klasikal dengan pembagian kelas dari satu hingga enam atau hingga belasan, seperti yang berlaku di Madrasah Mamba'ul Ulum. Saat ini, pengelolaan madrasah telah mengalami peningkatan dengan penerapan manajemen yang lebih baik. Terdapat komponen kurikulum yang teratur, administrasi yang lebih lengkap, dan lain sebagainya. Singkatnya, madrasah berusaha untuk terus mengembangkan diri secara optimal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, terutama saat lembaga ini bersaing dengan Departemen Agama dalam kebijakannya membentuk Madrasah Wajib Belajar (MWB).

B. Konsep Dasar Perubahan Sosial

Konsep adalah istilah yang bersifat abstrak yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami peristiwa alam serta fenomena sosial di sekitar kita. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan yang mendorong kita untuk mempelajari ilmu sosial, terutama mengenai fenomena perubahan sosial, sebagai berikut.

- 1) Karena kita ingin mempelajari dan mengamati manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*), yaitu sebagai individu, kelompok, dan organisasi masyarakat, lengkap dengan interaksi yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan, termasuk dalam konteks perubahan sosial.
- 2) Karena banyak problem sosial yang berhubungan dengan tindakan manusia (*human error*) dan masalah tersebut sering kali dapat memicu perubahan sosial.
- 3) Karena kita ingin memahami dan menganalisis hubungan sebab dan akibat (*kausalitas*) dari problem sosial yang berkaitan dengan perubahan sosial.
- 4) Karena kita ingin mengeksplorasi dan menganalisis efek atau hasil dari masalah sosial terhadap perubahan sosial yang terjadi.
- 5) Karena kita berkeinginan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis masalah sosial yang memicu perubahan sosial, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan tersebut.
- 6) Karena kita ingin membuktikan serta membangun metode, strategi, dan model untuk menyelesaikan masalah sosial melalui kegiatan penelitian yang berbasis pada perspektif perubahan sosial.
- 7) Untuk mengetahui serta menilai apakah masalah sosial dapat diselesaikan atau tetap tidak terpecahkan dengan adanya perubahan sosial yang baru (*invensi dan inovasi*).
- 8) Untuk memahami dan merespons perubahan sosial yang terjadi akibat perubahan dalam sistem sosial, struktur sosial, peran sosial, dan budaya sosial terkait dengan masalah sosial yang ada, serta sebagainya.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fokus, objek penelitian, dan pengamatan dalam ilmu sosial adalah meneliti manusia sebagai makhluk sosial (*individu dan masyarakat*) dengan beragam interaksi sosial.

Dalam pandangan sosiologis (*Weberian*), konsep individu dianggap bersifat otonom (*voluntary*), unik (*unique*), memiliki sifat internal (*kekuatan datang dari dalam diri individu*), terjalin dalam hubungan subjektif, dan memiliki kapabilitas interpretatif yang bersifat relatif, berupa cara menafsirkan serta bertindak.

Dalam pandangan lain, seseorang dilihat sebagai pelaku yang bertindak, individu yang memiliki pikiran, kehendak dan keinginan, kebebasan, kemampuan untuk menilai, serta kemampuan untuk memberikan arti dan makna terhadap peristiwa tertentu. Bahkan, individu tersebut dianggap mampu menilai tindakannya sendiri. Sementara itu, pengertian masyarakat (*sebagai kumpulan orang*) dalam pandangan sosiologis menurut Durkheim, dianggap memiliki sifat yang mendesak (*imperatif*), bersifat umum, memiliki kekuatan dari luar individu, menjalin hubungan objektif, dan merupakan fakta sosial, yaitu cara bertindak yang lebih jelas.

Dengan demikian, inti dari perbedaan antara individu dan masyarakat terletak pada pola pikir, cara berbicara, perasaan, tindakan, dan penampilan. Di sisi lain, adanya kesamaan bisa muncul dalam naluri untuk berkelompok, bergabung, bekerja sama, serta saling membantu. Apabila ada yang bertanya mengapa terdapat perbedaan serta persamaan dalam diri manusia dan menyebabkan perubahan yang cepat, jawabannya terletak pada kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu.

1. Kecerdasan emosional, dikenal sebagai *emotional quotient*, insting/naluri, atau indera.
2. Kecerdasan intelektual, yang disebut *intellectual quotient* atau akal.
3. Kecerdasan spiritual, yang dikenal sebagai *spiritual quotient*, keimanan, atau dimensi agama.
4. Kecerdasan untuk menciptakan dan berinovasi, yaitu menemukan dan melaksanakan hal-hal baru (*creature quotient*).

Kategori ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan sempurna (kaffah), membedakannya dari makhluk lain (hewan) yang ada di bumi.

C. Teori Utama Pola Perubahan Sosial

1. Teori Siklus

Teori siklus menganggap bahwa perubahan terjadi secara berulang. Apa yang kita alami saat ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam pola perubahan ini, tidak ada garis tegas yang memisahkan cara hidup primitif dari tradisional dan modern. Para pendukung teori siklus meyakini bahwa masyarakat harus melalui berbagai tahap. Namun, mereka beranggapan bahwa transisi masyarakat tidak berakhir pada tahap "akhir" yang sempurna, melainkan kembali ke tahap awal untuk memulai transisi baru. Oswald Spengler, seorang filsuf asal Jerman, berpendapat bahwa setiap peradaban besar melewati fase kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses berputar tersebut memakan waktu sekitar seribu tahun. Pitirim Sorokin, seorang sosiolog dari Rusia, berpendapat bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga budaya yang berputar tanpa henti. Ketiga budaya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kebudayaan ideasional

Kebudayaan ini didasarkan pada nilai-nilai dan kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat adikodrati.

b. Kebudayaan idealistis

Kebudayaan ini mengandung kepercayaan terhadap unsur adikodrati serta rasionalitas yang berdasarkan fakta yang saling berintegrasi untuk menciptakan masyarakat yang ideal.

c. Kebudayaan sensasi

Dalam kebudayaan ini, sensasi menjadi ukuran dari realitas dan tujuan hidup.

Sorokin berpendapat bahwa peradaban Barat modern merupakan peradaban yang lemah dan akan segera mengalami keruntuhan, kemudian akan bertransformasi menjadi kebudayaan ideational yang baru. Arnold Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, juga meyakini bahwa peradaban besar mengalami siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian.

2. Teori Perkembangan

Pengikut teori ini meyakini bahwa perubahan dapat diarahkan menuju suatu tujuan tertentu, seperti pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Masyarakat tradisional menggunakan alat yang terbuat dari bahan-bahan yang tersedia dengan cara manual. Teknologi ini kemudian berevolusi menjadi teknologi yang lebih canggih, yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Teori ini dikenal sebagai teori perkembangan atau linier. Teori perkembangan dibagi menjadi dua kategori, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Pendukung teori evolusi meyakini bahwa masyarakat secara perlahan-lahan berkembang dari tahap primitif, tradisional, hingga menuju masyarakat modern yang lebih kompleks dan maju. Herbert Spencer, seorang sosiolog asal Inggris, menyatakan bahwa setiap masyarakat mengalami perkembangan melalui tahapan yang jelas. Sementara itu, Emile Durkheim berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari bentuk solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Solidaritas mekanik merujuk pada cara hidup masyarakat tradisional yang lebih menekankan keseragaman sosial dengan ikatan ide bersama. Di sisi lain, solidaritas organik mencerminkan cara hidup masyarakat yang lebih maju yang lebih berfokus pada perbedaan daripada kesamaan.

Durkheim berargumen bahwa masyarakat terbagi secara beragam melalui proses diferensiasi kerja. Max Weber, dengan teori evolusinya, mengemukakan bahwa masyarakat berubah secara linier dari keadaan yang dipenuhi dengan pemikiran mistis dan takhayul menuju masyarakat yang bersifat rasional. Para pendukung teori revolusi, seperti Karl Marx, percaya bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi secara linier namun dengan karakteristik revolusioner. Marx menambahkan bahwa masyarakat feodal akan mengalami perubahan

revolusioner menuju masyarakat kapitalis. Oleh karena itu, pada intinya, suatu masyarakat akan berkembang menuju arah tertentu.

Teori-Teori Modern Mengenai Perubahan Sosial

1. Teori Modernisasi

Teori modernisasi berpendapat bahwa transformasi di negara-negara yang kurang berkembang akan mengikuti pola yang sama dengan negara-negara industri di Barat. Transformasi ini terjadi melalui proses modernisasi yang bertujuan agar negara-negara tersebut dapat berkembang lebih lanjut. Dalam pandangan teori ini, negara-negara yang terbelakang sering kali menghadapi berbagai kekurangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai fase kemajuan bernama *take off*.

Etzioni-Halevy dan Etzioni menyoroti bahwa selama periode perubahan atau transisi, sebuah negara akan mengalami revolusi demografi yang ditandai oleh beberapa hal, seperti penurunan angka kematian dan kelahiran; mengecilnya ukuran serta pengaruh keluarga; terbentuknya sistem stratifikasi yang lebih terbuka; pergeseran dari struktur feodal menjadi birokrasi; pengaruh agama yang semakin berkurang; perubahan peran pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal; kemunculan budaya massa, serta munculnya ekonomi pasar dan industrialisasi.

2. Teori Ketergantungan

Teori ini mengemukakan bahwa terdapat hubungan ketergantungan ekonomi antara negara-negara dunia ketiga dan negara-negara industri. Negara-negara yang kurang berkembang ini memerlukan pinjaman serta investasi dari negara-negara industri. Ketika negara-negara industri mengalami perkembangan, negara-negara dunia ketiga justru semakin tertinggal akibat kolonialisme dan neokolonialisme. Hubungan yang tidak seimbang antara negara-negara dunia ketiga dan negara-negara industri pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap meningkatnya kemiskinan di negara-negara dunia ketiga.

3. Teori Sistem Dunia

Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, yang menjelaskan bahwa perekonomian kapitalis global terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu negara inti, negara semi-periferi, dan negara periferi. Negara inti terdiri dari negara-negara di Eropa Barat, sementara negara semi-periferi mencakup negara-negara Eropa Selatan. Negara periferi terdiri dari negara-negara di Asia dan Afrika.

Kemampuan yang dimiliki oleh negara-negara inti memungkinkan mereka untuk mengendalikan sistem dunia. Dengan kemampuan tersebut, negara inti dapat memanfaatkan sumber daya dari negara semi-periferi dan negara periferi, yang mengakibatkan semakin besarnya jurang perbedaan antara negara inti dan negara periferi.

D. Substansi Perubahan Sosial

Transformasi sosial dalam komunitas muslim umumnya dapat dilihat melalui kemajuan peradaban yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inti dari perubahan sosial ini adalah munculnya peradaban Islam yang kokoh. Menurut Ibn Khaldun, salah satu indikator adanya peradaban adalah kemajuan dalam ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, optik, dan kedokteran. Bahkan, perkembangan atau kemunduran suatu peradaban sangat bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dalam teori Ibn Khaldun, aspek terpenting dari peradaban adalah ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang tanpa ada komunitas yang aktif dalam pengembangannya. Oleh karena itu, suatu peradaban harus dimulai dari "komunitas kecil", dan saat komunitas ini tumbuh, maka akan terbentuk komunitas yang lebih besar. Komunitas

tersebut biasanya muncul di daerah perkotaan atau dapat membentuk sebuah kota. Dari kota itulah, masyarakat akan terbentuk dengan berbagai aktivitas yang kemudian menciptakan suatu sistem sosial dan akhirnya melahirkan sebuah negara. Contoh-contoh kota seperti Madinah, Cordova, Baghdad, Samara, dan Cairo adalah beberapa contoh kota yang berasal dari komunitas-komunitas, yang selanjutnya melahirkan negara. Menurut Ibn Khaldun, indikator dari lahirnya dan berkembangnya suatu komunitas mencakup kemajuan teknologi (seperti tekstil, pangan, dan arsitektur), aktivitas ekonomi, pertumbuhan praktik kedokteran, serta seni (seperti kaligrafi, musik, dan sastra). Di balik tanda-tanda kelahiran peradaban itu, terdapat komunitas yang aktif dan kreatif dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Meski begitu, di balik faktor aktivitas dan kreativitas masyarakat, ada faktor lain yang berperan, yaitu agama, spiritualitas, atau kepercayaan. Para intelektual Muslim modern umumnya sependapat bahwa agama merupakan dasar peradaban; menolak agama berarti mengarah kepada kebodohan. Sayyid Qutb, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Abdul Jabbar Beg, mengatakan bahwa iman adalah sumber dari peradaban. Meskipun dalam peradaban Islam struktur organisasi dan bentuknya berbeda-beda secara material, prinsip dan nilai dasar yang dipegang tetap satu dan abadi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi ketakwaan kepada Tuhan, keyakinan akan keesaan Tuhan, pengakuan terhadap supremasi kemanusiaan di atas segala hal yang bersifat materi, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, pengendalian dari nafsu hewani, penghormatan terhadap keluarga, serta kesadaran akan perannya sebagai khalifah Allah di bumi dengan mengacu pada petunjuk dan perintah-Nya.

E. Kontribusi Pendidikan Islam Dalam Perubahan Sosial

Pendidikan agama Islam memberikan dampak yang sangat berarti bagi ketahanan sosial masyarakat. Pendidikan agama tidak hanya fokus pada aspek ritual dan akidah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan solidaritas. Nilai-nilai ini secara langsung memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga menghasilkan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung.

Informan yang terdiri dari para pendidik dan tokoh agama menyatakan bahwa pengajaran agama Islam di sekolah dan pesantren selalu menekankan pentingnya menjalin hubungan baik antar individu, menghormati satu sama lain, serta toleransi terhadap perbedaan. Ini menjadi pondasi yang penting dalam menciptakan ketahanan sosial yang mampu menghadapi berbagai konflik sosial dan potensi perpecahan di masyarakat yang beragam.

Dalam ranah ekonomi, pendidikan agama Islam juga terbukti dapat menanamkan etika dan prinsip ekonomi yang berlandaskan syariah. Contohnya adalah larangan praktik riba, kejujuran dalam transaksi, serta pentingnya berbagi kekayaan melalui zakat dan sedekah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat individu dari segi ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di kalangan masyarakat.

Seorang pelaku ekonomi syariah yang diwawancarai menyatakan bahwa pendidikan agama Islam menjadi pijakan penting dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga mengikuti ketentuan agama yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ekonomi masyarakat menjadi lebih stabil dan tangguh terhadap guncangan ekonomi dari luar.

Ketahanan budaya juga berperan penting dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai tradisional yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti kesopanan, etika, serta penghormatan terhadap tradisi dan warisan nenek moyang. Dengan cara ini, budaya lokal tidak akan hilang akibat modernisasi, melainkan dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam kerangka keislaman.

Para siswa yang mengikuti pendidikan agama Islam dilaporkan memiliki rasa bangga yang lebih besar terhadap identitas budaya mereka, sehingga mereka lebih aktif dalam

melestarikan tradisi dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini memperkuat kohesi sosial dan mengurangi risiko konflik budaya yang sering terjadi karena pergeseran nilai-nilai.

Data dari observasi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama Islam, seperti madrasah dan pesantren, berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang mendukung ketahanan masyarakat. Selain berfungsi sebagai tempat belajar agama, lembaga ini juga berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh para santri dan masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan sosial seperti pengajian, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta berbagai kegiatan sosial lainnya memperkuat jaringan sosial yang saling mendukung dalam situasi sulit, seperti saat terjadi bencana atau krisis ekonomi. Ini menandakan bahwa pendidikan agama Islam menciptakan modal sosial yang kuat dan efektif untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, terdapat juga program pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dalam pendidikan agama Islam. Program tersebut membekali para siswa dengan keterampilan bisnis yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi dan turut meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitas mereka.

Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai agama dalam pendidikan formal dan nonformal dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, sehingga menciptakan ketahanan yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, jumlah pengajar yang profesional dan terlatih dalam mengintegrasikan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya masih terbatas, dan ini menjadi salah satu hambatan utama. Banyak guru agama masih terfokus pada aspek ritual dan teks keagamaan tanpa dapat menghubungkannya dengan isu sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ekonomi, meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam diajarkan, penerapannya di masyarakat masih mengalami berbagai kendala, seperti minimnya akses terhadap modal usaha dan jaringan pasar yang mendukung usaha mikro berbasis syariah. Ini menghalangi pengembangan pendidikan agama Islam dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan efektif. Penelitian juga menemukan bahwa organisasi masyarakat dan lembaga zakat memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi yang berlandaskan pada pendidikan agama Islam. Kegiatan sosial semacam dukungan dana, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi yang berbasis agama semakin memperkuat kerja sama antara pendidikan dan pengembangan masyarakat.

Di samping itu, pendidikan agama Islam berkontribusi pada peningkatan kesadaran lingkungan dan budaya yang lestari. Di sejumlah lembaga pendidikan, nilai-nilai keislaman yang mengajarkan perlunya menjaga alam dan tanggung jawab terhadap lingkungan menjadi bagian dari proses pembelajaran, sehingga berperan dalam menjaga keseimbangan antara budaya dan alam di komunitas. Temuan lain menunjukkan bahwa siswa yang menerima pendidikan agama Islam cenderung memiliki pola pikir kritis yang positif terhadap tantangan sosial dan ekonomi. Mereka lebih mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam membuat keputusan dan tindakan yang berdampak positif pada ketahanan komunitas secara keseluruhan.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan agama Islam memiliki kontribusi yang luas dan beragam dalam memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, perlu dilakukan perbaikan pada kurikulum, metode pembelajaran, dan pengembangan SDM pengajar agar pendidikan agama Islam dapat benar-benar berfungsi sebagai alat strategis dalam pembangunan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan.

Kesimpulan/ الخلاصة

Pendidikan memiliki posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Ia bukan hanya alat untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga merupakan kekuatan sosial yang dapat membentuk nilai, sikap, dan perilaku individu. Dalam proses pendidikan, seseorang belajar untuk mengerti kenyataan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Oleh karena itu, pendidikan berperan sebagai agen perubahan yang mengarahkan masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Konsep perubahan sosial mengacu pada perubahan yang terjadi pada nilai, norma, dan pola perilaku yang terus menerus berlangsung dalam masyarakat. Perubahan ini bisa berasal dari faktor internal seperti inovasi dan konflik sosial, serta faktor eksternal seperti globalisasi dan kemajuan teknologi. Menurut teori sosiologi pendidikan dari ahli seperti Emile Durkheim, Karl Mannheim, dan Paulo Freire, pendidikan tidak hanya sekadar mereproduksi struktur sosial yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kritis masyarakat agar dapat mewujudkan perubahan yang positif dan adil.

Keterkaitan antara pendidikan dan perubahan sosial bersifat saling mempengaruhi. Pendidikan dapat mempercepat perubahan sosial dengan menciptakan individu yang berpikir logis, terbuka, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Di sisi lain, perubahan sosial juga mendorong sistem pendidikan untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai faktor seperti inovasi, pertumbuhan populasi, konflik sosial, kemajuan teknologi, dan dampak globalisasi menjadi penggerak utama yang menguatkan hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial. Karena itu, pendidikan seharusnya diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab moral dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang terus berkembang.

Referensi/ المصادر والمراجع

- Ali, M., & Ali, N. (1995). *Polemik kebudayaan*. Pustaka Jaya.
- Daulay, H. P. (2009). *Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Durkheim, É. (1956). *Education and sociology* (S. D. Fox, Trans.). The Free Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Mannheim, K. (1936). *Ideology and utopia: An introduction to the sociology of knowledge*. Harcourt, Brace & Company.
- Nata, A. (2005). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu pendidikan Islam: Pengantar menuju perbaikan mutu pendidikan Islam*. LKiS Pelangi Aksara.
- Soebahar, A. H. (2013). *Dinamika pendidikan Islam: Perspektif historis dan perbandingan*. RajaGrafindo Persada.
- Wahjotomo. (1997). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.